

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **V. 1. PERILAKU ELIT POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL**

##### **V. 1. 1. Perilaku Politik**

Kegiatan politik melalui pendekatan *behavioralisme* akan menjawab bahwa individu adalah yang secara aktual melakukan, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu yang berpola tertentu (Eulau, 1986, dalam Surbakti, 2010:168). Namun demikian yang selalu melakukan kegiatan politik adalah Pemerintah (lembaga-lembaga dan perannya) dan partai-partai politik karena fungsi mereka dalam bidang politik.

Pemilukada merupakan sebuah kegiatan politik yang bisa mempengaruhi bagaimana perilaku politik individu maupun partai politik yang terlibat pada prosesnya. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul sebagai partai politik yang di dalamnya terdiri dari banyak individu

politik tentu menunjukkan perilaku politiknya di dalam Pemilukada Bantul 2015.

Proses-proses politik yang mewarnai perjalanan PPP Bantul selama Pemilukada 2015 tentunya dipengaruhi perilaku politik elit partainya. Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti (2010:167) dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.

PPP Bantul dalam Pemilukada tahun 2015 yang lalu terlibat aktif menjalankan fungsi-fungsi politiknya. Keputusan politik yang diambil PPP Bantul di Pemilukada 2015 yaitu mendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021 Sri Suryawidati-Misbakhul Munir yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR).

Keputusan politik PPP Bantul memberikan dukungan kepada pasangan Sri Suryawidati-Misbakhul Munir di Pemilukada mendapat penolakan dari berbagai organisasi laskar-laskar sayap partai PPP Bantul. Penolakan organisasi laskar-laskar sayap partai ini kemudian memunculkan adanya perpecahan dukungan politik, karena laskar-laskar PPP Bantul kemudian memilih bergabung dan mendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Suharsono-Abdul Halim Muslih yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat Kabupaten Bantul.

Perilaku politik sebagai sebuah kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan perlu diteliti lebih lanjut lagi. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi seperti disampaikan diatas tadi terkait dukungan politik PPP Bantul kepada pasangan yang diusung oleh PDIP di Pemilukada Bantul 2015 yaitu Sri Suryawidati dan adanya penolakan dari organisasi laskar-laskar PPP Bantul yang memilih mendukung pasangan calon Bupati Suharsono yang diusung

oleh Gerindra, maka penulis akan meneliti lebih lanjut lagi tentang perilaku politik elit PPP Bantul di Pemilukada 2015.

Adanya dukungan politik dari DPC PPP Bantul kepada pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bantul yang diusung PDIP Sri Suryawidati-Misbakhul Munir terjadi dengan melalui proses yang cukup panjang dan dilatarbelakangi oleh berbagai macam peristiwa politik sebelumnya. Proses politik Pemilukada di Bantul ini sudah mulai berjalan pasca Pemilu Pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu atau satu setengah tahun sebelum Pemilukada 2015.

Pasca pemilu pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu tercipta dua koalisi besar partai-partai politik nasional. Adanya koalisi besar partai politik ini efek dari adanya dukungan politik saat Pilpres kepada pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai HANURA, Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan nama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung oleh Partai GERINDRA, Partai Amanat Nasional,

GOLKAR, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat dengan nama Koalisi Merah Putih (KMP).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bariq Ghufron selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul mengenai kondisi politik PPP Bantul menjelang proses Pemilukada adalah sebagai berikut :

“.. Proses Pemilukada selang waktu dengan Pilpres tidak lama, koalisi di Pilpres khususnya di DIY masih menguat. Komunikasi PPP Bantul untuk Pemilukada di Bantul ini melalui partai-partai yang dulu bergabung di Koalisi Merah Putih (KMP). KMP di Bantul sudah komitmen mengusung satu pasang calon dari KMP. Masing-masing partai juga melakukan komunikasi dengan calon-calon Kepala Daerah di Bantul dan sepakat untuk melawan Bupati incumbent (Sri Suryawidati)” (13 Maret 2017, jam 10.10 WIB).

Koalisi Merah Putih (KMP) Kabupaten Bantul menjelang akhir tahun 2014 sempat memunculkan wacana mengusung Aryo Winoto sebagai calon Bupati yang diajukan oleh partai Gerindra dan Bariq Ghufron sebagai calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Munculnya wacana pasangan Aryo Winoto-Bariq Ghufron direspon oleh PPP Bantul pada tanggal 25 September 2014 mengadakan rapat pimpinan

DPC PPP Bantul yang dihadiri seluruh pengurus struktural di tingkat cabang, kemudia Ketua dan Sekretaris dari 17 Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-kabupaten Bantul, juga Organisasi Otonom Partai terdiri dari Generasi Muda Persatuan Indonesia (GMPI) Bantul, Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Bantul dan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Bantul.

Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dilakukan oleh DPC PPP Bantul tersebut menghasilkan keputusan yaitu :

1. Mengusung Aryo Winoto sebagai calon Bupati.
2. Mencalonkan ketua DPC PPP Bantul yakni Bariq Ghufroon sebagai calon wakil bupati. Usulan calon wakil ini karena anggota partai di Koalisi Merah Putih Bantul boleh mengajukan nama memutuskan mendukung dan mengusung pasangan calon .

Partai Gerindra Bantul kemudian melakukan deklarasi dukungan kepada Aryo Winoto sebagai calon Bupati Bantul. Proses dukungan politik kepada Aryo Winoto-Bariq Ghufroon inilah yang menjadi awal dimulainya proses politik DPC PPP Bantul menjelang Pemilu 2015.

Pencalonan Aryo Winoto-Bariq Ghufron untuk maju di Pemilukada Bantul 2015 ternyata tidak berjalan dengan baik dan bubar sebelum sempat di daftarkan ke KPUD Bantul untuk mengikuti Pemilukada 2015. Kegagalan Aryo Winoto sebagai bakal calon Bupati yang direkomendasikan dari KMP salah satu penyebabnya terkait dengan tidak keluarnya rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra untuk menyetujui Aryo Winoto sebagai calon Bupati yang diusung oleh partai Gerindra Bantul di Pemilukada Bantul 2015.

Tidak keluarnya surat keputusan (SK) dari DPP Partai Gerindra yang menyetujui Aryo Winoto ini kemudian cukup berpengaruh terhadap soliditas Koalisi Merah Putih di Bantul, sehingga situasi politik menjadi semakin tidak jelas dan bertambah panas. Ditengah situasi politik yang tidak jelas, Suharsono sebagai calon Bupati yang belum mendapat dukungan politik ternyata sudah intens berkomunikasi dengan partai Gerindra, sehingga membuat situasi semakin bertambah rumit dan sebagian partai-partai di KMP tidak setuju untuk mencalonkan Suharsono di Pemilukada.

Adanya perpecahan di internal partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) Bantul dikarenakan masing-masing partai di KMP sudah mempunyai calon masing-masing untuk diajukan sebagai calon Bupati-Wakil Bupati, semisal Partai Amanat Nasional berencana mengajukan DR. Sagiran sebagai Calon Bupati dan Suharsono yang cukup intens berkomunikasi dengan beberapa partai politik di KMP Bantul, termasuk dengan partai Gerindra setelah mengetahui Aryo Winoto membatalkan keinginannya untuk tetap maju sebagai calon Bupati pada Pemilu 2015.

Terkait dengan situasi politik parta-partai di KMP dijelaskan Bariq Ghufron, Ketua DPC PPP Bantul sebagai berikut :

“... DPP Partai Gerindra di pusat tidak akan memberikan rekomendasi kalau belum ada kejelasan KMP di DIY ini, khususnya di Bantul sudah pecah atau masih solid. Pada saat itu ketua partai Gerindra Bantul menginformasikan jika KMP di Bantul masih utuh, karena berusaha agar partai-partai di KMP itu masih bersatu mendukung pak Suharsono. Paginya sudah ada informasi jika ketua DPC Partai Gerindra di Bantul sudah diganti oleh DPP Partai Gerindra karena menginformasikan KMP masih utuh, sedangkan penggantinya menginformasikan jika KMP sudah pecah. Mereka disuruh membuktikan jika KMP di Bantul sudah pecah. Buktinya yang mendukung pak Harsono ini harus ada beberapa partai di KMP, maka bergabung beberapa partai dari KMP Bantul sehingga



surat rekomendasi dari DPP Partai Gerindra ini turun” (13 Maret 2017, jam 10.14 WIB).

Batalnya koalisi pencalonan Aryo Winoto-Bariq Ghufron diusung oleh KMP Bantul di Pemilukada 2015 kemudian membuat DPC PPP Bantul melakukan rapat pimpinan partai di tingkat Kabupaten bersama dengan 17 PAC PPP se-kabupaten Bantul dan juga Organisasi Otonom Sayap PPP untuk membatalkan dukungan politik kepada Aryo Winoto sebagai calon Bupati yang akan didukung pada Pemilukada Bantul 2015. Rapat Pimpinan (Rapim) dilakukan oleh DPC PPP Bantul karena sebelumnya dukungan politik yang diberikan PPP Bantul kepada Aryo Winoto juga melalui mekanisme Rapim di DPC PPP Bantul.

Hadirnya Suharsono sebagai calon Bupati dilingkaran politik KMP Bantul menjadi polemik di internal KMP sendiri. Beberapa partai politik diantaranya Partai Amanat Nasional menilai Suharsono adalah calon yang merupakan “boneka” dari Idham Samawi, mantan Bupati Bantul dua periode dan juga suami dari Bupati Bantul “*incumbent*” Sri Suryawidati.

Seperti yang disampaikan oleh Bambang Aris selaku Tim Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DIY terkait hadirnya Suharsono sebagai calon Bupati di Pemilukada Bantul :

“... Partai Gerindra di Bantul tetap menginginkan agar mengusung Suharsono. PAN tidak sepakat dengan Harsono, karena merasa Harsono adalah ‘bonekanya’ Idham Samawi. PAN mengajukan DR. Sagiran. Artinya antara PAN dan Gerindra berseteru, yang berarti tidak ada kesepakatan dengan Gerindra” ( 8 Maret 2017, jam 10.08 WIB).

Lobi-lobi politik yang dijalankan di KMP Bantul mengalami kegagalan karena Gerindra tetap berusaha agar Suharsono disetujui oleh partai-partai di KMP sebagai Calon Bupati, sedang PAN tidak sepakat dengan keinginan dari Gerindra. PAN tetap dengan keputusannya untuk mengajukan DR. Sagiran sebagai calon Bupati dari KMP Bantul.

Lebih lanjut Bambang Aris dalam wawancara terkait kondisi politik di KMP Bantul mengatakan :

“... Pertama, Gerindra mengatakan jika di Sleman AB 1 nya Golkar, kemudian di Gunung Kidul AB 1 diambil PAN, mosok sekarang di Bantul mau diambil PAN lagi, karena memang haknya Gerindra (untuk Pemilukada Bantul), kesepakatannya memang seperti itu (di KMP), jadi tidak ada titik temu. Yang kedua, akhirnya DR.

Sagiran tidak mau dan mengundurkan diri” (8 Maret 2017, Jam 10.15 WIB).

Menyikapi situasi politik yang terjadi di internal KMP Bantul maka DPC PPP Bantul mulai membuka komunikasi politik dengan bakal calon Bupati yang berencana maju Pemilukada. Setelah batal mendukung Aryo Winoto-Bariq Ghufron, PPP Bantul mulai membuka komunikasi politik dengan Suharsono. Adanya komunikasi politik antara PPP Bantul dengan Suharsono juga ditegaskan oleh Bariq Ghufron selaku Ketua DPC PPP Bantul dalam wawancara :

“... Dengan pak Suharsono jauh sebelum proses Pemilukada sudah berkomunikasi intens, namun waktu itu pak Harsono keinginannya (maju Bupati) bukan lewat partai yang ada di KMP tapi lewat PDI Perjuangan, yang notaben pak Harsono itu ingin lewat PDI Perjuangan karena merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif di Bantul. Kita (PPP Bantul) bahkan sudah memfasilitasi pak Harsono untuk bertemu dengan pak Syukri (Ketua DPW PPP DIY), kemudian dengan Tim PPP Bantul sudah beberapa kali” (08 Maret 2017, Jam 10.04 WIB).

Komunikasi politik dengan Suharsono selain dilakukan oleh DPC PPP Bantul, juga dilakukan oleh DPW PPP DIY. Kebijakan DPW PPP DIY dari awal mengarahkan agar PPP Bantul berkoalisi dengan partai yang menjadi lawan politik *incumbent*,

dalam hal ini melawan Sri Suryawidati yang masih menjabat Bupati Bantul.

Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul yang mencoba melakukan komunikasi politik dengan Suharsono menemui kebuntuan. Hambatan yang terjadi salah satunya karena Suharsono tidak menyetujui dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan surat keputusan (SK) rekomendasi dari DPP Partai Persatuan Pembangunan sebagai calon resmi Bupati yang didukung oleh PPP di Pemilukada Bantul.

Adanya biaya untuk mengurus SK ke DPP PPP yang saat itu sedang terjadi konflik dualisme kepemimpinan sebagai Ketua Umum DPP PPP antara kubu Romahurmuzy dengan kubu Djan Farid, maka sesuai aturan yang ditetapkan oleh KPU bagi partai politik yang sedang pecah atau terjadi dualisme kepemimpinan agar bisa menjadi partai pengusung pasangan calon di Pemilukada Bantul harus mendapat SK rekomendasi persetujuan dari dua kubu Ketua Umum DPP PPP saat itu, baik dari DPP PPP kubu Romarhumuzy maupun kubu Djan Farid. Terkait dengan adanya biaya pengurusan SK dari DPP PPP tersebut diatas

dijelaskan dalam wawancara dengan Bambang Aris selaku Tim

Pemenangan Pemilu DPW PPP DIY sebagai berikut :

“... Aturan KPU bagi partai politik yang sedang pecah atau terjadi dualisme kepemimpinan agar bisa menjadi partai pengusung pasangan calon di Pemilukada Bantul harus mendapat SK rekomendasi persetujuan dari dua kubu Ketua Umum DPP PPP saat itu di Jakarta. Dari DPP PPP kubu Djan Farid, untuk mendapatkan rekomendasi dimintai anggaran 10 juta tiap pasangan calon dalam rangka untuk fit and proper test. Kubu DPP PPP Romy meminta setiap daerah yang mempunyai anggota legislatif PPP, setiap anggota legislatif biayanya 50 juta. Kebetulan di Bantul itu PPP punya empat orang anggota legislatif, dikalikan 50 Juta sehingga totalnya 200 juta. Adanya biaya-biaya itu kita (PPP) sampaikan ke pasangan calon dan intinya Suharsono keberatan untuk itu dan juga terkait dengan kontrak politik yang diajukan DPC PPP Bantul” (8 Maret 2017, Jam 10.03 WIB).

Keberatan Suharsono untuk menjadikan PPP Bantul sebagai partai pengusung salah satu sebab utamanya karena adanya konflik internal di tingkat DPP PPP yang terjadi dualisme kepemimpinan sehingga menyulitkan dalam melakukan komunikasi politik terkait proses Pemilukada Bantul. Selain sebab yang telah disampaikan diatas, tingginya *cost* atau biaya politik yang harus dikeluarkan Suharsono untuk mendapatkan SK rekomendasi dari DPP PPP baik dari kubu Djan Farid maupun Romahurmuzy juga menjadi alasan kuat.

#### **V.1.1.1.1. Konflik Dualisme Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan**

Adanya dualisme kepemimpinan di tingkat DPP PPP memang sangat tidak menguntungkan posisi PPP Bantul dalam proses Pemilukada. Konflik dualisme Ketua Umum DPP PPP dimulai pasca Pemilu Legislatif 2014. Rendahnya perolehan suara PPP yang hanya lima persen dari seluruh partai yang ada di DPR RI menjadi pemicu konflik di internal partai.

Perolehan suara partai secara nasional yang rendah memunculkan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum (Ketum) DPP PPP saat itu Suryadharma Ali. Suryadharma dianggap gagal membawa partai kepada perolehan suara yang baik di Pemilu Legislatif 2014.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali juga dianggap oleh sebagian besar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dan jajaran elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP telah bertindak melanggar batas Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP. Tindakan melanggar AD/ART parta yang

dituduhkan kepada Suryadharma Ali adalah menghadiri kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Wakil Ketua Dewan Penasihat PPP KH. Muhammad Nur Iskandar SQ dan Fungsionaris PPP Dzan Faridz dalam kampanye terbuka Partai Gerindra di Stadion Gelora bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses 5 April 2017 jam 10.45 WIB).

Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung, disepakati PPP akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal calon Presiden (Capres) yang ada saat itu. Dalam bursa capres PPP itu, tidak ada nama Prabowo. Akibat keputusan sepihak Suryadharma tersebut, DPP PPP menggelar rapat yang dikabarkan akan terjadi *islah* antara Suryadharma dengan kelompok yang tidak setuju dengan keputusan dukungannya ke Prabowo.

Eskalasi konflik ini terus membesar dan semakin meningkat akibat respon yang diberikan Ketum PPP Suryadharma Ali tidak menyelesaikan masalah utama, bahkan memperuncing dan memperbesar masalah. Konflik itu terus meluas hingga

melibatkan petinggi partai di Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar DPP PPP.

Respon Suryadharma Ali dengan memecat beberapa elite utama PPP yang terlibat konflik akhirnya berbuntut panjang. Elite-elite PPP yang dipecat tidak terima dengan perlakuan itu dan justru menganggap sikap dan tindakan politik Ketum PPP semakin jauh dan keluar dari AD/ ART partai. Klimaks konflik PPP terjadi ketika Suryadharma Ali berupaya melibatkan Ketua Majelis Syariah PPP, KH. Maimun Zubair, untuk turun tangan menyelesaikan konflik dengan cara "*Islah*" atau Perdamaian.

Cara ini ditempuh Suryadharma Ali setelah elite-elite PPP menyetujui diselenggarakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP. Mukernas di Bogor itu bertujuan untuk mempercepat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP pada tanggal 9-10 Mei 2014, meninjau ulang koalisi PPP dengan Partai Gerindra serta menganulir semua keputusan pemecatan jajaran elite pimpinan PPP oleh Ketum PPP, Suryadharma Ali.

Suryadharma Ali segera menghubungi Ketua Majelis Syariah PPP, KH. Maimun Zubair, untuk mendamaikan konflik dan



menganulir semua keputusan yang dibuat oleh jajaran elite pimpinan PPP.

Konflik ini pun mulai reda sejak seruan "*Islah*" diumumkan Ketua Mejalis Syari'ah PPP, KH. Maimun Zubair. KH. Maimun Zubair juga meminta semua elit pimpinan pusat DPP PPP untuk meninjau ulang koalisi dengan Partai Gerindra.

Pada 17 Februari 2016, Menteri Yasonna mengesahkan kembali susunan komposisi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Mukhtamar Bandung. Kepengurusan itu disahkan dengan masa bakti enam bulan. Kepengurusan PPP yang diketuai Suryadharma Ali dengan Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal itu diminta segera membentuk panitia penyelenggara muktamar atau muktamar luar biasa dalam rangka menyelesaikan konflik di tubuh PPP ([www.nasional.tempo.com](http://www.nasional.tempo.com), diakses tanggal 5 April 2017 jam 10.47).

Dalam penutupan Silaturahmi Nasional PPP pada 6 Februari 2016 yang lalu, Mahkamah PPP juga merekomendasikan digelarnya muktamar *islah* selambat-lambatnya April 2016.

Selain itu, muktamar *islah* harus dilaksanakan dua kubu yang berkonflik, yakni kubu Romahurmuzy dan kubu Djan Faridz, yang didahului musyawarah kerja nasional.

Tanpa adanya SK rekomendasi persetujuan dari DPP PPP maka sesuai aturan pemilu dari KPU yang berlaku, PPP Bantul hanya bisa menjadi partai pendukung dan tidak bisa menjadi partai pengusung pasangan calon di Pemilukada. Alasan tersebut tadi menjadi salah satu bahan pertimbangan Suharsono lebih memilih Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat sebagai mitra koalisi di Pemilukada Bantul 2015.

Dari aspek syarat prosentase perolehan suara minimal yang diatur KPU sebagai syarat bisa mengusung sendiri pasangan calon Bupati-Wakil Bupati, maka sudah mencukupi bagi Suharsono mengajak beberapa partai yang tergabung di KMP Bantul tersebut. Selain itu karena partai-partai tersebut tidak ada konflik di tingkat DPP Partainya sehingga bisa mengeluarkan SK rekomendasi kepada Suharsono sebagai calon Bupati.

#### **V.1.1.1.2. Kegagalan Berkoalisi Dengan Calon Bupati Suharsono Serta Munculnya Dukungan Politik PPP Bantul Kepada Calon Bupati Sri Suryawidati**

Seperti yang disampaikan oleh Eko Sutrisno Aji, Ketua Fraksi PPP di DPRD Kabupaten Bantul dalam wawancara terkait kegagalan PPP Bantul berkoalisi dengan partai Gerindra mengusung Suharsono di Pemilukada sebagai berikut :

“... Dari awal kita sudah komunikasi dengan Suharsono, tetapi pada saat itu tidak ada partai yang mau mengusungnya karena masih takut dengan kekuatan Sri Suryawidati sebagai calon incumbent dan kemungkinan hanya satu putaran. Pada saat itu juga dinamika politik sangat cepat dan Suharsono tiba-tiba sudah diusung oleh Gerindra. Karena hanya Gerindra yang mengusung Harsono sehingga belum ada 20 persen dari total elemen kursi di DPRD Bantul sebab Gerindra hanya mempunyai enam kursi legislatif. Lalu ditengah perjalanannya masuklah PKS sehingga jumlahnya menjadi sepuluh kursi karena PKS memiliki empat kursi dan sudah cukup untuk bisa memenuhi persyaratan dukungan, ditambah lagi kemudian menyusul partai Demokrat ikut mengusung Suharsono” (15 Maret 2017, Jam 14.25 WIB).

Pasca kegagalan berkoalisi dengan Suharsono maka PPP Bantul melakukan koordinasi dengan DPW PPP DIY terkait situasi politik yang terjadi dan sekaligus juga meminta arahan dari DPW PPP untuk memutuskan langkah politik selanjutnya

untuk tetap mendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati tertentu atau memilih abstain atau netral di Pemilukada Bantul 2015. H.M Syukri Fadholi selaku Ketua DPW PPP DIY dalam wawancara terkait arahan DPW PPP DIY kepada DPC PPP Bantul menyikapi situasi politik yang terjadi di Bantul pasca kegagalan PPP Bantul berkoalisi dan mengusung pasangan calon kepala daerah Suharsono-Abdul Halim Muslih pada Pemilukada menyampaikan sebagai berikut:

“... waktu itu yang lebih menangkan aspirasi dari PPP adalah Bu Sri Suryawidati atau bu Ida Samawi, sementara Harsono belum memberikan kepastian karena waktu itu antara berkoalisi dengan rencana kontrak politik itu seiring. Karena kemudian bu Ida (Sri Suryawidati) yang ditawarkan (kontrak politik) langsung merespon, maka elit politik PPP Bantul kemudian mengambil kebijakan untuk konsultasi dengan DPW PPP DIY apakah dimungkinkan (berkoalisi dengan Sri Suryawidati). Pada saat itu saya mengatakan kalo memang bu Ida mau melakukan kontrak politik dengan tiga dimensi, yaitu dimensi illahiyah, dimensi insaniah dan dimensi moralitas, maka dipersilahkan. Karena waktu itu belum ada kejelasan Suharsono, maka DPC PPP Bantul meminta izin berkoalisi dengan bu Sri Suryawidati. Setelah itu DPW PPP DIY melakukan rapat dan kemudian memberikan disposisi untuk diijinkan berkoalisi” (14 Maret 2017, 13.46 WIB).

Proses koalisi PPP Bantul dengan partai pengusung Sri Suryawidati secara *intens* terjadi pasca pendaftaran calon Bupati

dan Wakil Bupati Bantul ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bantul. PPP Bantul yang tidak bisa berkoalisi dengan Suharsono dan belum menentukan sikap untuk kemudian berkoalisi dengan Sri Suryawidati, maka DPC PPP Bantul melakukan koordinasi dengan DPW PPP DIY. Seperti yang disampaikan Bariq Ghufron selaku Ketua DPC PPP Bantul dalam wawancara terkait dengan sikap politik PPP sebagai berikut :

“... Pasca pendaftaran dan PPP Bantul belum bergabung dengan pak Suharsono ataupun bu Ida (Sri Suryawidati), DPC PPP Bantul berkomunikasi dengan DPW PPP DIY. Kemudian dengan mengajukan surat kontrak politik bagi siapapun diantara pasangan calon yang mau atau bersedia menandatangani pakta integritas, artinya melakukan perjanjian politik dengan PPP. Pada saat itu pak Suharsono tidak bersedia, sedangkan pasangan Ida-Munir pada saat itu mau mempelajari kontrak politik tersebut terlebih dahulu dan saat itu juga berbarengan dengan surat dari bu Sri Suryawidati untuk beraudiensi dengan pengurus DPC PPP Bantul. Menyikapi situasi yang terjadi, DPC PPP Bantul segera mengambil langkah dan waktu itu diminta oleh DPW PPP DIY setelah tidak bisa bergabung atau mendukung pak Suharsono diminta untuk komunikasi dengan Ida-Munir”. (13 Maret 10.15 WIB).

Keputusan DPC PPP Bantul menjalin komunikasi dengan Sri Suryawidati kemudian dikoordinasikan dengan pengurus cabang melalui rapat pleno DPC PPP Bantul untuk mengambil keputusan terkait dengan rencana audiensi pasangan Sri Suryawidati-

Misbakhul Munir. Dalam rapat pleno tersebut ditawarkan opsi DPC PPP Bantul akan melakukan Rapat Pimpinan terlebih dahulu atau menerima audiensi Sri Suryawidati bersama tim pemenangannya. Hasil rapat pleno pengurus DPC PPP Bantul yang juga dihadiri oleh Tim Pemilukada dari DPW PPP DIY adalah menerima audiensi dari Sri Suryawidati-Misbakhul Munir beserta tim pemenangannya terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan dan visi misi dari Sri Suryawidati-Misbakhul Munir.

Dalam audiensi Sri Suryawidati dan Misbakhul Munir bersama timnya ke DPC PPP Bantul sekaligus memberikan jawaban dari bu Sri Suryawidati yang siap untuk kerjasama dengan DPC PPP Bantul termasuk menandatangani kontrak politik yang diajukan oleh DPC PPP Bantul. Setelah adanya audiensi dari pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bantul Sri Suryawidati dan Misbakhul Munir maka DPC PPP Bantul kemudian mengadakan rapat pimpinan (Rapim) untuk memutuskan dukungan politik PPP Bantul kepada pasangan calon Bupati-Wakil Bupati mana yang akan didukung pada Pemilukada 2015.

Rapat Pimpinan (Rapim) DPC PPP Bantul dilakukan dengan mengundang seluruh pengurus harian partai di tingkat cabang, ketua dan sekretaris 17 Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Bantul, kemudian juga dihadiri pimpinan Organisasi Otonom Partai yang resmi yaitu GMPI, Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Bantul dan Wanita Persatuan Pembangunan Bantul. Rapim DPC PPP Bantul untuk memutuskan dukungan politik di Pemilukada 2015 juga dihadiri oleh Tim Pemenangan Pilkada DPW PPP DIY. Rapim yang diadakan DPC PPP Bantul tersebut sudah sesuai dengan mekanisme partai berdasar aturan resmi yang ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DPC PPP Bantul.

Dalam Rapim DPC PPP Bantul seperti yang disampaikan diatas kemudian menghasilkan keputusan bahwa DPC PPP Bantul beserta seluruh pimpinan 17 PAC PPP se-Kabupaten Bantul dan organisasi otonom sayap partai sepakat hanya sebagai partai pendukung pasangan calon di Pemilukada Bantul karena terkait adanya konflik dualisme Kepemimpinan di tingkat DPP PPP dan juga terkait aturan dari KPU. Sesuai hasil rapim

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didukung pada Pemiluakada Bantul 2015 adalah Sri Suryawidati dan Misbakhul Munir yang diusung oleh koalisi partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat Kabupaten Bantul.

#### **V. 1. 1. 2. Pragmatisme**

Kebijakan politik Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Bantul yang mendukung pasangan calon Sri Suryawidati-Misbakhul Munir dalam Pemiluakada Bantul 2015 merupakan sebuah keputusan yang harus diambil oleh partai untuk tetap melaksanakan fungsi PPP sebagai partai politik. Sikap PPP Bantul yang memilih untuk tetap berpartisipasi pada Pemiluakada dibentuk oleh situasi politik yang terjadi di Bantul.

Sikap DPC PPP Bantul yang kemudian memutuskan untuk mendukung pasangan *incumbent* Sri Suryawidati-Misbakhul Munir merupakan konsekuensi politik yang harus diambil setelah kegagalan mengusung pasangan calon sendiri yang sempat dideklarasikan di awal sebelum masuk proses tahapan



Pemilukada, hingga kegagalan berkoalisi mendukung pasangan Suharsono-Abdul Halim Muslih. Sikap tegas PPP Bantul dari awal yang sudah menyatakan akan melawan kandidat Bupati *incumbent* yaitu Sri Suryawidati yang diusung oleh PDI Perjuangan Bantul namun dalam perjalanan politiknya memilih mendukung calon Bupati *incumbent* yang pada awal tahapan Pemilukada dahulu merupakan lawan politik.

Keputusan PPP Bantul berkoalisi dengan PDIP mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbakhul Munir sangat bertolak belakang dengan kebijakan partai di awal proses Pemilukada dimana PPP Bantul berkeinginan melawan Bupati *incumbent*, seperti disampaikan oleh H.M Syukri Fadholi selaku Ketua DPW PPP DIY dalam suatu wawancara sebagai berikut :

“... Ketika itu memang DPW PPP DIY mengarahkan harus kepada lawan politik bu Ida (Sri Suryawidati)” (14 Maret 2017, Jam 13.38).

Untuk mengetahui kebijakan politik PPP Bantul yang tidak sesuai dengan rencana awal ingin melawan Bupati *incumbent* di Pemilukada, maka bisa diteliti lebih jauh dengan menggunakan

pendekatan pragmatisme. Pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pola pikir pragmatis bisa terjadi dilandasi beberapa kemungkinan, seperti untuk mendapatkan kekuasaan, posisi atau jabatan strategis di partai, materi (uang) baik untuk kepentingan pribadi maupun partai yang mungkin akan didapatkan. Jika diteliti dengan menggunakan pendekatan pragmatisme akan terlihat keputusan PPP Bantul berkoalisi dengan PDIP dan mendukung pasangan calon Sri Suryawidati-Misbakhul Munir merupakan sebuah tindakan yang pragmatis.

Tindakan pragmatis yang ditunjukkan oleh elit PPP Bantul dalam proses terjadinya dukungan politik ini bisa dianalisa dari perilaku politik elit PPP Bantul. Modal politik PPP Bantul di Pemilukada Bantul tahun 2015 adalah mempunyai empat orang anggota legislatif di DPRD Kabupaten Bantul. Dengan jumlah perolehan suara di Pemilu Legislatif sebanyak 38.007 suara menjadikan PPP Bantul memiliki nilai politik yang bagus bagi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati yang akan maju pada Pemilukada Bantul 2015. Dalam proses Pemilukada

permasalahan utama PPP Bantul yaitu adanya dualisme kepemimpinan di tingkat DPP PPP, dimana ada dua Ketua Umum yang saling mengklaim sebagai pemimpin partai. Munculnya dua kubu Ketua Umum DPP PPP antara kubu Djan Farid dan kubu Romahurmuziy berefek ke daerah, dimana Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Cabang Bantul kesulitan untuk bisa berpartisipasi menjadi partai pengusung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati di Bantul. Kesulitan tersebut dikarenakan sesuai aturan dari KPU bahwa partai yang terjadi dualisme kepemimpinan di tingkat DPP partainya, harus bisa menunjukkan surat keputusan (SK) rekomendasi bagi pasangan calon dari dua kubu pimpinan, dalam hal ini DPC PPP Bantul harus bisa mendapat tanda tangan SK dari DPP PPP pimpinan Djan Farid maupun Romahurmuziy.

Dualisme tersebut juga menjadi pertimbangan penting bagi pasangan calon yang maju di Pemilukada Bantul untuk mengajak PPP Bantul berkoalisi. Syarat harus mendapat rekomendasi dari dua kubu DPP PPP yang ada tentu memberatkan pasangan calon, terutama dari sisi biaya yang harus dikeluarkan. Seperti yang

disampaikan oleh Bambang Aris dalam wawancara selaku Tim Pemenangan Pemilu DPW PPP DIY terkait adanya biaya pengurusan SK ke DPP PPP sebagai berikut :

“... Aturan KPU bagi partai politik yang sedang pecah atau terjadi dualisme kepemimpinan agar bisa menjadi partai pengusung pasangan calon di Pemilukada Bantul harus mendapat SK rekomendasi persetujuan dari dua kubu Ketua Umum DPP PPP saat itu di Jakarta. Dari DPP PPP kubu Djan Farid, untuk mendapatkan rekomendasi dimintai anggaran 10 juta tiap pasangan calon dalam rangka untuk fit and proper test. Kubu DPP PPP Romy meminta setiap daerah yang mempunyai anggota legislatif PPP, setiap anggota legislatif biayanya 50 juta. Kebetulan di Bantul itu PPP punya empat orang anggota legislatif, dikalikan 50 juta sehingga totalnya 200 juta. Adanya biaya-biaya itu kita (PPP) sampaikan ke pasangan calon dan intinya Suharsono keberatan untuk itu dan juga terkait dengan kontrak politik yang diajukan DPC PPP Bantul” (8 Maret 2017, Jam 10.03 WIB).

Pola pikir pragmatis bisa terjadi karena dilandasi beberapa aspek yang membentuknya. Berbagai aspek tersebut juga terkait dengan situasi atau kondisi yang terjadi. Setelah gagal untuk mengajukan kadernya menjadi Wakil Bupati di awal proses Pemilukada hingga kegagalan berkoalisi dengan Suharsono, maka pilihan politik terakhir yang paling memungkinkan dan harus dilakukan PPP Bantul agar tetap bisa berpartisipasi di Pemilukada Bantul 2015 yaitu melakukan dukungan politik untuk

berkoalisi dengan pasangan calon Bupati-wakil Bupati Sri Suryawidati-Misbakhul Munir yang diusung oleh PDI Perjuangan Bantul.

Meskipun sejak awal PPP Bantul maupun DPW PPP DIY menolak untuk berkoalisi dengan Bupati *incumbent* di Pemilukada Bantul 2015, namun dalam situasi politik yang terjadi di Bantul saat itu mendukung pasangan calon Sri Suryawidati-Misbakhul Munir adalah pilihan politik yang harus dilakukan PPP Bantul dibandingkan jika harus *abstain* sebagai partai pengusung maupun pendukung di Pemilukada Bantul.

#### **V. 1. 1. 2. Akomodatif**

Situasi politik di Bantul sebelum Pemilukada hingga sampai proses pencalonan dan pendaftaran pasangan Bupati-Wakil Bupati di Bantul berubah dengan cepat. Gerakan politik partai-partai yang ada di Bantul begitu masif terutama dalam menjalin koalisi dukungan. PPP Bantul yang memutuskan untuk mendukung pasangan calon Sri Suryawidati-Misbakhul Munir di Pemilukada terus melakukan koordinasi di tingkat internal

struktural partai maupun dengan Pimpinan Wilayah PPP DIY dan juga dengan beberapa partai politik lain yang tergabung di koalisi.

Perilaku akomodatif yang ditunjukkan elit PPP Bantul menunjukkan adanya suatu keseimbangan hubungan antar kelompok politik dalam berinteraksi adalah memperbolehkan organisasi laskar-laskar PPP di Bantul yang menolak untuk mengikuti kebijakan politik DPC PPP Bantul mendukung pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir untuk berbeda pilihan dengan mendukung pasangan calon Suharsono-Abdul Halim Muslih.

Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul tentunya telah menegosiasikan segala kepentingan yang ada dalam sebuah proses politik di Pemilukada. Dalam wawancara dengan H.M Syukri Fadholi selaku Ketua DPW PPP DIY terkait dengan diperbolehkannya laskar-laskar PPP Bantul berbeda pilihan politik dengan mendukung pasangan Suharsono-Abdul Halim Muslih sebagai berikut :

“...Teman-teman laskar sebagian memilih Harsono, jadi ada komunikasi dengan Harsono dan waktu itu disepakati

boleh dan tidak ada masalah. Karena saya diminta untuk membantu menjelaskan ketika sudah terjadi kontrak politik kemudian ada perbedaan. Karena ini ada perbedaan kemudian disepakati boleh, ya jalan, tidak ada masalah” (14 Maret 2017, Jam 13.33 WIB).

Terkait dengan diperbolehkannya laskar-laskar PPP Bantul berbeda pilihan politik dengan kebijakan DPC PPP Bantul yang mendukung pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir juga dijelaskan oleh Eko Sutrisno Aji selaku Sekretaris DPC PPP Bantul dalam wawancara sebagai berikut :

“...Kita memang tidak bisa memberikan sanksi yang tegas, karena mereka laskar dan dalam AD/ART kita tidak termasuk struktural. Mereka adalah konstituen kita” (15 Maret 2017, Jam 14.13 WIB).

Menurut Soerjono Soekanto (2006:68)

istilah akomodasi digunakan dalam dua arti, yaitu sebagai suatu keadaan dan proses. Sebagai suatu keadaan, akomodasi diartikan sebagai kenyataan adanya suatu keseimbangan hubungan antar individu atau kelompok dalam berinteraksi. Sebagai suatu proses, akomodasi dimaksudkan sebagai usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan.

Perilaku politik elit PPP Bantul yang akomodatif dikarenakan banyak kepentingan maupun keinginan yang harus diakomodasi agar segala prosesnya berjalan sesuai dengan rencana kerja partai yang telah ditentukan. Keinginan untuk tetap terlibat aktif di Pemilukada Bantul menyebabkan PPP Bantul harus memutuskan sikap terkait dukungan yang akan diberikan.

Kondisi politik yang terjadi di Bantul dengan adanya dua pasangan calon Bupati yaitu Sri Suryawidati yang diusung oleh PDI Perjuangan Bantul, Partai Nasdem dan Partai Golkar dan pasangan calon Suharsono yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, mengharuskan PPP Bantul menyesuaikan diri untuk menentukan sikap bergabung dengan salah satu pasangan calon kepala daerah sesuai kebijakan partai yang harus tetap berpartisipasi di Pemilukada 2015. Sikap politik yang diambil kemudian adalah mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbakhul Munir sesuai dengan hasil rapat pimpinan DPC PPP Bantul dan memperbolehkan keinginan organisasi laskar-laskar PPP Bantul yang mendukung Suharsono-Abdul Halim Muslih dengan syarat tidak menggunakan atribut



PPP dalam proses kampanye pasangan Suharsono-Abdul Halim Muslih.

### **V. 1. 1. 3. Kritis**

Berpolitik adalah sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur didalamnya. Dengan banyaknya unsur yang terlibat maka setiap mengambil kebijakan atau keputusan politik beserta produk-produk politik lainnya harus dilandasi dengan perilaku kritis elit politik yang berwenang. Sikap kritis berbeda dengan kritik, kritis merupakan sebuah kemampuan berpikir.

Menurut Cece Wijaya (2010) dalam Nurhayati (2014:15) mengungkapkan gagasannya mengenai kemampuan berpikir kritis, yaitu kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna.

Sikap kritis elit PPP Bantul terhadap keputusan untuk mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir di Pemiluakada Bantul 2015 kemudian ditunjukkan dengan dengan

melakukan kontrak politik kepada pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir. Menurut H.M Syukri Fadholi selaku Ketua DPW PPP DIY tentang pentingnya kontrak politik untuk Sri Suryawidati-Misbhakul Munir sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

“...Tolak ukur apakah kebijakan-kebijakan yang diambil itu cenderung menggabungkan antara kekuatan yang sekuler dengan religius, itu memang pegangan kita ya kontrak politik. Kalau mereka punya karakter sekuler maka kemudian kita ikat dengan kontrak politik. Betapapun Ida (Sri Suryawidati) didukung oleh PDIP, tetapi ketika beliau menjabat sebagai Bupati maka kontrak politiknya menjadi nasionalis religius” (14 Maret, Jam 13.50 WIB).

Kontrak politik yang diberlakukan oleh PPP Bantul kepada pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir dilakukan untuk menjaga marwah PPP sebagai partai berbasis agama Islam dan dakwah sebagai jalan politiknya. Sebagai dua partai yang berbeda ideologi politiknya maka menjadi penting bagi DPC PPP Bantul melakukan kontrak politik sebagai perilaku kritis yang ditunjukkan PPP Bantul terhadap pasangan calon kepala daerah yang didukungnya pada Pemilu 2015.

Kontrak politik PPP yang ditawarkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sri Suryawidati-Misbhakul Munir berisi tiga point utama, yaitu :

1. Dimensi *illahiyyah*

prinsip kepemimpinan yang *fiil ibadi* atau sebagai ibadah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

2. Dimensi *insaniah*

prinsip *fiil ummati* atau untuk mengabdikan kepada ummat atau rakyat.

3. Dimensi moralitas

Jabatan atau kekuasaan untuk menegakkan moralitas amar'makruf nahi munkar.

Dengan adanya kontrak politik, elit PPP berusaha untuk mengamankan posisi partai di dalam koalisi pendukung Sri Suryawidati-Misbhakul Munir terutama jika pasangan calon Kepala Daerah yang mereka dukung kemudian memenangkan Pemilu pada Bantul 2015. Kontrak politik sangat menentukan

masa depan politik PPP Bantul baik di Legislatif maupun di tingkat masyarakat.

#### **V. 1. 1. 4. Rasional**

Sebagai elit politik seharusnya mampu berpikir rasional atas setiap kebijakan yang dibuatnya. Setiap kebijakan yang dilakukan tanpa berpikir rasional kemungkinan akan mendapatkan hasil dan respon negatif, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partainya. Elit politik harus mampu berpikir dan bertindak berdasarkan efeknya bagi masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam proses memilih keputusan politik maka berpikir serta bertindak rasional sangat penting. Perilaku elit politik DPC PPP Bantul yang memutuskan tetap mengikuti proses pelaksanaan Pemilukada Bantul 2015 sesuai dengan fungsi partai sebagai alat politik dalam sebuah kegiatan politik. Seperti yang disampaikan oleh Bariq Ghufron selaku Ketua DPC PPP Bantul dalam wawancara sebagai berikut :

“...Sudah menjadi komitmen PPP hasil dari koordinasi DPC dan DPW PPP DIY, sepahit apapun kita tetap ada pilihan. Artinya tetap harus bergabung dengan salah satu calon. Karena Pemilukada itu adalah agenda politik,

sebagai partai politik namun malah tidak terlibat padahal itu agenda politik” (13 Maret 2017, Jam 10.53 WIB).

Penulis dari penelitian di lapangan tentang perilaku politik rasional menemukan fakta bahwa elit politik PPP Bantul memutuskan tetap harus berpartisipasi dalam kegiatan PemiluKada dan menolak untuk abstain karena menjaga fungsi PPP sebagai partai politik. Lebih lanjut disampaikan Bariq Ghufron terkait koalisi dengan PDI Perjuangan mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir sebagai berikut :

“... Kalo kita sebagai pengurus partai, bukan sebagai person, itu pertimbangannya beda. Sebagai pengurus partai, kalo selama itu mekanisme kita tempuh dan kita tidak merekayasa, artinya apapun kita sampaikan, kita sudah mengakui sah sebagai keputusan partai. Kalau terjadi penolakan di masyarakat atau akar rumput, itu sudah menjadi bagian dari resiko dan sudah kami pertimbangkan, pasti akan terjadi penolakan semacam itu. Namun saat itupun kita sudah mengantisipasi karena kalau teman-teman di laskar atau di grass root ini tidak mau tahu bahwa keputusan tersebut sudah dilakukan dengan mekanisme yang benar” (13 Maret 2017, Jam 10.35 WIB).

Kewajiban partai politik adalah turut serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik. Kondisi politik yang terjadi di Bantul saat itu membuat DPC PPP Bantul hanya puunya

pilihan mendukung Sri Suryawidati dan Misbakhul Munir dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan supaya tetap bisa mengikuti proses Pemilukada Bantul 2015.

### **V. 1. 2. Pilihan Politik Elit Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul Di Pemilukada**

Pilihan politik terbentuk karena elit politik yang menginginkan manfaat partisipasi yang luas, berupa dukungan bagi mereka sendiri dan bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Partisipasi politik yang dimobilisasi akan menuju kepada pilihan politik tertentu (Huntington, 1994:40).

Pilihan politik sebagai wujud partisipasi yang biasanya ditentukan oleh efek-efek terhadap kemampuan para elit politik :

- a. Meraih kekuatan dan tetap berkuasa
- b. Untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan politik lainnya, seperti kemerdekaan nasional, perubahan revolusioner, pembangunan ekonomi, dan pemerataan sosio-ekonomi (Huntington,1994:41).

Pilihan politik elit DPC PPP Bantul adalah mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sri Suryawidati-Misbhakul Munir yang diusung oleh PDI Perjuangan Bantul, Partai Nasdem dan Partai Golkar. Dipilihnya pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir karena dari dua calon pasangan yang maju di Pemilukada Bantul 2015 dan bersedia menandatangani kontrak politik yang diajukan DPC PPP Bantul hanya pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir.

Memilih Sri Suryawidati-Misbhakul Munir adalah untuk meraih kekuasaan, dimana Sri Suryawidati merupakan Bupati *incumbent* yang maju lagi dalam Pemilukada Bantul 2015. Dengan modal status sebagai orang yang masih berkuasa maka harapan untuk menjadi pemenang di Pemilukada lebih besar. Seperti yang disampaikan oleh Bambang Aris dari Tim Pemenangan Pemilu Pemenangan Pemilu DPW PPP DIY, beliau menyampaikan sebagai berikut :

“...Karena kondisi politiknya memang seperti itu dan ketika itu hampir semua warga Bantul mengatakan Suharsono tidak akan mungkin menang, maka sekali-kali DPC PPP Bantul dukung calon yang menang” (8 Maret, Jam 10.04 WIB).

Seperti yang disampaikan Bambang Aris diatas, mendukung Sri Suryawidati karena posisi politiknya sebagai Bupati *incumbent* masih cukup tinggi dalam pandangan masyarakat Bantul. Masih tingginya posisi politik Sri Suryawidati cukup menguntungkan DPC PPP Bantul pada Pemilu pada dikarenakan relatif lebih mudah dalam sosialisasi dan melaksanakan program-program kampanye di masyarakat.

#### **V. 1. 2. 1. Patron Klien**

Menurut Scott (1972) dalam Suprihatin (2002) mengemukakan hubungan patron klien sebagai suatu keadaan khusus dari persekutuan *dyadic* (dua orang) yang melibatkan sebagian besar persahabatan, sementara seorang atau kelompok yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi berperan sebagai patron, menggunakan pengaruh, dan penghasilannya untuk memberikan perlindungan dan kebaikan kepada seseorang atau kelompok yang memiliki status sosial ekonomi lebih rendah. Kelompok ini berperan sebagai klien, bersedia membalas budi



berupa dukungan menyeluruh yang meliputi pelayanan pribadi kepada patron.

PPP Bantul dengan PDI Perjuangan di Bantul selama dua periode PemiluKada selalu berlawanan. Dalam legislatif PPP Bantul juga menjadi partai penyeimbang di luar kekuatan PDI Perjuangan yang merupakan mayoritas di DPRD.

Melihat faktor historis hubungan politik antara PPP Bantul dengan Sri Suryawidati maupun PDI Perjuangan, keputusan PPP memilih mendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bantul Sri Suryawidati-Misbhakul Munir di PemiluKada 2015 terjadi karena situasi politik saat itu. Wawancara dengan Aryunadi selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Bantul sekaligus mantan Ketua Tim Pemenangan Kampanye Sri Suryawidati-Misbhakul Munir pada PemiluKada Bantul 2015 terkait dengan ada atau tidak pengaruh patron klien terhadap pilihan PPP Bantul berkoalisi bersama PDI Perjuangan mendukung Sri Suryawidati-Misbhakul Munir sebagai berikut :

“... Kami melihat partai politik itu sama, apakah PPP, PKS, GOLKAR, PAN atau PKB. Bahwa mereka adalah sahabat-sahabat partai politik yang kenapa tidak kalau kita punya kehendak sebagai partai politik mengajak teman

sebanyak-banyaknya, yang pada akhirnya tahun 2015 PPP bersama kita. Katakanlah proses menuju kesana ada proses komunikasi politik individu, komunikasi politik mewakili antar pimpinan, komunikasi politik dengan melibatkan jejaring kita masing-masing itu kita laksanakan. Sehingga kalau pertanyaannya kenapa PPP ya karena ideologinya sama. Beliau-beliau adalah juga kekuatan politik, kekuatan partai yang memiliki kekuatan massa. Kalau kita punya calon sudah barang tentu mengajak teman sebanyak-banyaknya, siapapun apapun partainya, kenapa tidak kalau memang bisa kita ajak” (11 Maret 2017, jam 11.05).

Pernyataan yang disampaikan Aryunadi diatas menegaskan bahwa koalisi yang dibangun dengan PPP Bantul mendukung Sri Suryawidati karena pertimbangan PPP sebagai sebuah partai politik yang mempunyai kekuatan massa sehingga cukup menguntungkan sebagai mitra koalisi. PDI Perjuangan Bantul menempatkan semua partai politik pada posisi yang sama, tidak memandang sebagai klien yang lebih lemah sehingga perlu dilindungi dengan kekuatan politik yang dimiliki PDI Perjuangan dengan harapan kemudian PPP Bantul memberikan feed back berupa dukungan politik kepada Sri Suryawidati yang akan maju sebagai calon Bupati pada Pemilukada.

### **V. 1. 2. 2. Karisma**

Pilihan politik DPC PPP Bantul mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir memang turut dipengaruhi oleh karisma Sri Suryawidati sebagai Bupati *incumbent* di Bantul. Sampai sejauh mana karisma menjadi aspek yang mempengaruhi kebijakan politik PPP Bantul untuk mendukung Sri Suryawidati dalam Pemilukada, maka penulis mewawancarai Bariq Ghufron Selaku Ketua DPC PPP Bantul. Beliau menyampaikan sebagai berikut :

“... Pertimbangan karisma bu Sri Suryawidati lebih pada menilai kinerja selama lima tahun menjadi Bupati Bantul, prestasinya luar biasa. Selama lima tahun ini sudah empat kali kinerja bu Sri Suryawidati mendapat prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena setiap Kepala Daerah prestasinya dilihat dari itu” (13 maret 2017, Jam 10.39 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bariq Ghufron diatas, faktor karisma Sri Suryawidati dalam lima tahun menjabat Bupati Bantul berhasil mendapat prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat selama empat tahun. Atas dasar karismanya sebagai Kepala Daerah yang mampu berprestasi tersebut menjadi salah satu alasan PPP Bantul

mendukung sebagai calon Bupati di Pemilukada 2015. Mendukung calon Bupati yang masih berstatus sebagai Bupati *incumbent* serta mempunyai karisma prestasi kerja yang bagus dan juga diusung oleh partai pemenang pemilu yang menguasai Legislatif, harapan DPC PPP Bantul peluang kemenangan calon yang didukung menjadi lebih besar di Pemilukada.

### **V. 1. 2. 3. Komunitas Agama**

Basis kultural PPP adalah umat Islam dan organisasi-organisasi masyarakat (Ormas) Islam. PPP adalah partai yang didirikan dari fusi (penggabungan) empat partai berbasis Islam di masa Orde Baru, Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), PERTI dan Permusi.

Sebagai partai berbasis massa Islam tentunya pilihan politik PPP tidak lepas dari adanya komunitas agama Islam yang melatarbelakangi. Dalam kegiatan memilih pasangan calon Bupati-Wakil Bupati di Pemilukada Bantul faktor komunitas agama tidak menjadi bahan pertimbangan bagi DPC Bantul dalam menentukan dukungannya kepada pasangan calon.

Namun tindakan yang berbeda justru dilakukan oleh massa pendukung PPP Bantul di tingkat laskar, dimana organisasi massa laskar-laskar pendukung PPP ini lebih memilih mendukung pasangan Suharsono-Abdul Halim Muslih. Faktor adanya Abdul Halim Muslih yang merupakan seorang Kiai dan berasal dari organisasi Islam Nadhatul Ulama (NU) lebih membawa kedekatan secara kultur komunitas keagamaan.

Basis massa PPP di Bantul yang kental dengan santri dan remaja masjid membuat mereka tidak mau bergabung mengikuti kebijakan DPC PPP Bantul mendukung calon Bupati Sri Suryawidati yang diusung oleh PDI Perjuangan, partai berbasis nasionalis. Wawancara dengan H.M Syukri Fadholi selaku Ketua DPW PPP DIY tentang faktor komunitas keagamaan terutama ormas-ormas Islam bagi PPP dalam memilih Sri Suryawidati sebagai calon Bupati sebagai berikut :

“...Tolak ukur apakah kebijakan-kebijakan yang diambil itu cenderung menggabungkan antara kekuatan yang sekuler dengan religius, itu memang pegangan kita ya kontrak politik. Kalau mereka punya karakter sekuler maka kemudian kita ikat dengan kontrak politik. Betapapun Ida (Sri Suryawidati) didukung oleh PDIP, tetapi ketika beliau menjabat sebagai Bupati maka kontrak

politiknya menjadi nasionalis religius” (14 Maret, Jam 13.50 WIB).

Dari pernyataan H.M. Syukri Fadholi tersebut diatas menegaskan bahwa pilihan mendukung Sri Suryawidati bukan karena faktor komunitas agama dengan mengakomodir pendapat amupun pandangan ormas-ormas Islam yang berafiliasi dengan PPP di Bantul sebagai bahan pertimbangan memilih, namun lebih sebagai partai yang berlandaskan asas keislaman sehingga perlu untuk membuat kontrak politik yang memiliki nilai-nilai keislaman tentang keutamaan seorang pemimpin. Sri Suryawidati adalah calon Bupati yang bersedia menandatangani kontrak politik yang diajukan oleh PPP Bantul.

Kontrak politik PPP seperti yang sudah pernah penulis sampaikan di pembahasan sebelumnya berisi tiga point utama, yaitu :

1. Dimensi *illahiyyah*

Prinsip kepemimpinan yang *fiil Ibadī* atau sebagai ibadah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

2. Dimensi *insaniah*

Prinsip *fiil ummati* atau untuk mengabdikan kepada ummat atau rakyat.

### 3. Dimensi moralitas

Jabatan atau kekuasaan untuk menegakkan moralitas *amar'makruf nahi munkar*.

Kontrak politik yang diberlakukan oleh PPP Bantul kepada pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir dilakukan untuk menjaga marwah PPP sebagai partai berbasis agama Islam dan dakwah sebagai jalan politiknya. Dengan adanya kontrak politik tersebut maka gerak dan langkah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung PPP tetap mempunyai garis keislaman yang diwujudkan dengan tiga konsep kepemimpinan yang Islami.

#### **V. 1. 2. 4. Keputusan Pragmatis**

Keputusan DPC PPP Bantul memilih mendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sri Suryawidati-Misbhakul Munir dianalisa dari situasi dan kondisi politik yang terjadi merupakan sebuah keputusan yang pragmatis. Sejak awal proses Pemilukada

DPW PPP DIY sudah mengarahkan agar berkoalisi dengan pasangan calon yang bukan Bupati *incumben* Sri Suryawidati. Selama lima tahun kepemimpinan Sri Suryawidati, PPP di Bantul menjadi partai penyeimbang di luar struktur kekuasaan baik di Eksekutif maupun di Legislatif.

Terkait pragmatisme keputusan PPP Bantul memilih berkoalisi dengan PDIP mengusung Sri Suryawidati seperti yang disampaikan H.M Syukri Fadholi selaku Ketua DPW PPP DIY dalam wawancara :

“... Jujur mengatakan ini kebijakan yang bersifat jalan tengah. Kalau kita mau rasional, fakta mengatakan dukungan kepada bu Ida ketika itu masih cukup kuat. Tetapi ada faktor X ketika Idham (suami Sri Suryawidati) tersangkut kasus korupsi, itu menjadi kartu truft menjatuhkan kita. Ini faktor X mungkin yang dominan ketika Pemilukada diangkat kembali” (14 Maret 13.14 WIB).

Berdasarkan yang disampaikan H.M Syukri Fadholi diatas maka bisa dianalisa bahwa pilihan PPP Bantul memilih Sri Suryawidati untuk didukung di Pemilukada Bantul 2015 sebagai sebuah keputusan pragmatis. Meskipun sudah mengetahui resiko mendukung Sri Suryawidati yang sedang mendapat perhatian dari masyarakat karena suaminya menjadi tersangka kasus korupsi,



namun PPP Bantul maupun DPW PPP DIY tetap merekomendasikan mendukung pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir di Pemilukada Bantul 2015.

Keputusan mendukung Sri Suryawidati juga akibat kondisi politik saat itu karena PPP Bantul gagal mengusung calon sendiri melalui Koalisi Merah Putih, kemudian gagal mendukung pasangan calon Suharsono-Abdul Halim Muslih. Ambisi untuk tetap mendapatkan kekuasaan maka cara pragmatis ditempuh dengan mendukung Sri Suryawidati-Misbhakul Munir, meskipun dari awal proses Pemilukada PPP sudah merencanakan untuk menjadi melawan politik Sri Suryawidati sebagai Bupati Bantul *incumbent* yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan Bantul. Seperti disampaikan oleh H.M Syukri Fadholi selaku Ketua DPW PPP DIY dalam suatu wawancara sebagai berikut :

“...Ketika itu memang DPW PPP DIY mengarahkan harus kepada lawan politik bu Ida (Sri Suryawidati)” (14 Maret 2017, Jam 13.38).

Sesuai dengan yang disampaikan H.M. Syukri Fadholi maka temuan di penelitian ini bahwa pilihan PPP Bantul berkoalisi

mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir adalah keputusan yang pragmatis. Pragmatis bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan materi saja, namun pragmatis ditempuh dengan banyak maksud untuk meraih kekuasaan.

#### **V. 1. 2. 5. Keputusan Rasional**

Sejak awal proses Pemilukada Bantul 2015 kebijakan DPC PPP Bantul maupun DPW PPP DIY adalah melawan Bupati *incumbent* Sri Suryawidati yang akan maju diusung oleh partainya PDIP Perjuangan dengan partai Nasdem dan Partai Golkar. Perlawanan politik yang dilakukan PPP Bantul dengan mencoba mengusung calon dari Koalisi Merah Putih (KMP) Bantul, yang terdiri dari PPP, PAN, Gerindra, Golkar, PKS dan Demokrat. Namun ditengah perjalanan terjadi konflik internal di KMP karena PAN dan Gerindra tidak sepakat dengan calon yang akan diusung. PAN mengusulkan DR. Sagiran sebagai calon Bupati dan Gerindra mengusung Suharsono.

Karena tidak ada kesepakatan diantara partai-partai yang bergabung di KMP, pada akhirnya PAN memilih *abstain* tidak

mendukung maupun mengusung pasangan calon di Pemilukada Bantul 2015. Gerindra kemudian bersama PKS, PKB dan Partai Demokrat mengusung Suharsono-Abdul Halim Muslih. Situasi politik tersebut disikapi PPP Bantul dengan melakukan komunikasi politik kepada Suharsono, namun kondisi PPP Bantul yang tidak bisa menjadi partai pengusung tanpa ada rekomendasi dari dua kubu Ketua Umum DPP PPP baik dari Romahurmuzy maupun Djan Farid menjadi alasan tidak bisa melanjutkan komunikasi politik untuk berkoalisi.

Setelah tidak bisa berkoalisi dengan Suharsono-Abdul Halim Muslih, maka pilihan terakhir untuk didukung dalam Pemilukada adalah pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir. Dengan alasan tidak ingin abstain di Pemilukada Bantul 2015 maka PPP Bantul meminta ijin kepada DPW PPP DIY untuk berkoalisi bersama PDI Perjuangan mendukung Sri Suryawidati-Misbhakul Munir.

Sebuah pilihan politik yang tidak rasional dilakukan oleh DPC PPP Bantul dengan mendukung calon Bupati yang sejak awal proses Pemilukada sudah diposisikan sebagai lawan politik di

Pemilukada, namun demi tetap mendapat kekuasaan maka lawan politik menjadi calon yang didukung. Seharusnya jika yang digunakan adalah keputusan rasional, PPP Bantul bisa memilih abstain seperti yang dilakukan oleh PAN di Pemilukada Bantul 2015. Siapapun nantinya yang terpilih sebagai Bupati-Wakil Bupati Bantul, PPP Bantul bisa menjadi partai penyeimbang diluar pemerintahan yang berkuasa, baik di Eksekutif maupun di Legislatif seperti yang sebelum ini dilakukan oleh PPP Bantul terhadap pemerintahan Bupati Bantul Sri Suryawidati.

#### **V. 1. 2. 6. Oligarki Elit Partai**

Winters (2002:1) dalam Choiriyati (2013:689) melacak oligarki sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil. Sementara itu dasar kekuasaan dari minoritas oligarkis bersumber pada segala bentuk pengaruh minoritas yang didasakan kepada konsentrasi kekuasaan.

Karakteristik utama dari Oligarki adalah berbeda dari semua minoritas lainnya, dikarenakan dasar kekuasaan *oligark* adalah kekayaan material. Sebagian besar teori mengenai Oligarki

mendefinisikan istilah oligarki sebagai satu ragam “kekuasaan sekelompok kecil”, lalu oligark (*oligarch*) dimaknai sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi secara besar-besaran sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Umumnya sumber daya tersebut harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi , biarpun tidak harus dimiliki sendiri (Winters, 2002:8, dalam Choiriyati, 2013:690).

Dalam partai politik sekelompok minoritas yang mampu menguasai sumber daya dan berkuasa adalah elit partai. Putnam dalam Mas’oed (2001) menyampaikan bahwa elit merupakan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Fokus kajiannya adalah kekuasaan, yang terbagi ke dalam dua konsepsi. Pertama, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain. Kedua, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif, seperti undang-undang. Karena itu, Putnam membagi elit ke dalam dua

kelompok, yakni mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting”, dan mereka yang tidak memilikinya.

Elit politik PPP Bantul terdiri dari Ketua dan seluruh Wakil Ketua, Sekretaris dan Seluruh Wakil Sekretaris, Bendahara dan seluruh Wakil Bendahara yang semuanya merupakan pengurus harian (PH). Elit politik inilah yang dijelaskan oleh Winters diatas sebagai oligarki, kelompok kecil yang mempunyai kekuasaan dan menguasai sumber daya partai.

Para elit partai PPP Bantul ini yang kemudian memutuskan arah kebijakan politik partai untuk mendukung pasangan calon kepala daerah Sri Suryawidhati dan Misbhakul Munir di Pemilukada Bantul 2015 yang lalu. Kekuasaan oligarki elit politik PPP Bantul menggunakan sumber daya yang mereka miliki berupa konstituen dan juga para anggota legislatifnya di DPRD Kabupaten Bantul.

Para elit PPP Bantul menggunakan kekuasaannya sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif di dalam proses Pemilukada Bantul 2015 yang lalu. Mulai dari proses awal mencoba mengusung calon sendiri dari internal partai

namun tidak mendapat dukungan dari partai-partai di Koalisi Merah Putih Bantul.

Kemudian para elit partai ini beralih mencoba menggunakan pengaruh kekuasaannya membawa DPC PPP Bantul berkoalisi dengan Suharsono-Abdul Halim Muslim, namun juga gagal mencapai kesepakatan politik hingga akhirnya mendukung Sri Suryawidati-Misbhakul Munir sebagai pilihan terakhir agar tetap bisa berpartisipasi di Pemilukada Bantul 2015. Meskipun keputusan mendukung Sri Suryawidati-Misbhakul Munir yang diusung oleh PDIP Bantul tersebut mendapat penolakan dari element konstituen PPP yang tergabung di dalam organisasi laskar-laskar partai.

Gerakan organisasi laskar-laskar sayap PPP Bantul menolak kebijakan partai ini terasa berat karena harus melawan kebijakan elit partai yang telah memutuskan mendukung pasangan Sri Surya Widati-Misbakhul Munir, sehingga mereka memutuskan untuk tidak mengikuti kebijakan DPC PPP Bantul dengan cara mendukung pasangan Suharsono-Abdul Halim Muslih dalam Pemilukada.

## **V. 2. KEBIJAKAN DUKUNGAN POLITIK KEPADA PASANGAN CALON BUPATI-WAKIL BUPATI SRI SURYAWIDATI DAN MISBHAKUL MUNIR DALAM PEMILUKADA BANTUL 2015**

### **V. 2. 1. Aktor Pembuat Kebijakan**

Kebijakan mendukung pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir dalam Pemilukada Bantul 2015 dilakukan melalui mekanisme tahapan rapat pleno maupun rapat pimpinan DPC PPP Bantul. Sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ADRT) Partai Persatuan Pembangunan penentuan dukungan politik dalam Pemilukada dilakukan melalui mekanisme rapat.

Mekanisme dukungan DPC PPP Bantul kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sri Suryawidati-Misbhakul Munir seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Eko Sutrisno Aji selaku Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bantul sebagai berikut :



“...Sesuai dengan AD/DRT kita, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kita, Partai Persatuan Pembangunan yang waktu Mukthamar kemarin kita pegang. Kita memutuskan melalui beberapa agenda, yang pertama berkaitan menerima silaturahmi dari pasangan calon Ida-Munir. Kita bersama dengan pengurus harian Cabang kemudian bersama dengan dengan DPW PPP DIY, maka dari itu kita memutuskan ada agenda rapat pleno DPC PPP, kemudian kita konsultasikan kepada DPW PPP DIY. Setelah itu kita rapat yang namanya rapat pimpinan. Rapat pimpinan terdiri dari pengurus DPC, kemudian tujuh belas (17) Pimpinan Anak Cabang, lalu organisasi sayap yaitu ada WPP, GMPI dan GPK. Ini yang memang diatur di AD/ART. Kemudian disitulah ada keputusan karena kita menawarkan sesuai instruksi dari DPW PPP DIY ada kontrak politik, yang menandatangani adalah Sri Suryawidati-Misbhakul Munir. Itulah kemudian kita memutuskan mendukung Sri Suryawidati-Misbhakul Munir” ( 15 Maret 2017, Jam 14.03 WIB).

Pernyataan dari Eko Sutrisno Aji juga diperkuat oleh Bariq Ghufron selaku Ketua DPC PPP Bantul dalam wawancara terkait aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan mendukung Sri Suryawidati-Misbhakul Munir sebagai berikut :

“...Audiensi menerima Sri Suryawidati-Misbhakul Munir dan timnya tidak melibatkan Pimpinan Anak Cabang. Audiensi hanya kita didampingi oleh DPW PPP DIY. Kemudian setelah audiensi, untuk kita menentukan pilihan mau mendukung kemana kita itu rapim. Rapim melibatkan DPC PPP Bantul, ketua, sekretaris PAC dan saat itu dihadiri oleh tim DPW PPP DIY. Kemudian dalam rapim itu, DPC dan tujuh belas PAC sepakat, karena kita hanya sebagai partai pendukung tidak sebagai

partai pengusung, kita sepakat untuk mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir” (13 Maret 10.21 WIB).

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dilapangan, maka aktor yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dukungan politik DPC PPP Bantul kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sri Suryawidati-Misbhakul Munir yaitu Pengurus Harian (PH) DPC PPP DIY, Ketua dan Sekretaris dari tujuh belas (17) PAC PPP, organisasi sayap partai GMPI, WPP, GPK. Selain itu ada Tim Pendamping Badan Pemenangan Pemilu DPW PPP DIY yang terdiri dari Bambang Aris, Mahmud, Edi Susilo dan Muslih Ilyas.

## **V. 2. 2. Bentuk-Bentuk Dukungan**

Setelah resmi mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sri Suryawidati-Misbhakul Munir maka langkah berikutnya adalah memberikan dukungan kepada pasangan calon tersebut dalam proses Pemilukada hingga pasca Pemilukada. Terkait dengan bentuk-bentuk dukungan yang dilakukan DPC PPP Bantul kepada pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul

Munir disampaikan dalam wawancara oleh Bariq Ghufron selaku

Ketua DPC PPP Bantul sebagai berikut :

“...kita pada dukungan politik, dukungan massa sebenarnya kita maksimal untuk tim yang ada di PemiluKada. Tapi ya nuwunsewu yang kemarin ada beda dengan temen-temen lapangan, jadi tidak kelihatan. Dukungan massa kita buktikan dengan menghadiri kampanye-kampanye terbuka maupun tertutup. Kita sekalipun laskar atau temen-temen dilaskar rumput tidak mendukung tetapi masih banyak yang hadir”. (13 Maret 2017, Jam 10.46 WIB).

Sebagai partai pendukung bukan pengusung, dukungan yang diberikan PPP Bantul kepada pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir adalah dukungan politik yang diwujudkan dengan keluarnya perintah dari DPC PPP Bantul kepada struktural partai di Kabupaten Bantul, Pimpinan Anak Cabang, Organisasi sayap partai hingga kepada massa akar rumput untuk mendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sri Suryawidati-Misbhakul Munir pada PemiluKada Bantul 2015. Selain dukungan politik yang diberikan, DPC PPP Bantul memberikan dukungan massa yang diwujudkan dengan pengerahan massa pada kegiatan-kegiatan kampanye tertutup

maupun terbuka, sosialisasi serta relawan saksi-saksi di tempat pemungutan suara.

### **V. 2. 3. Keluasan Dan Keterbatasan Dukungan**

Keluasan dukungan yang diberikan oleh DPC PPP Bantul terhadap pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir dalam Pemilukada sangat normatif pada wilayah kerja politik PPP Kabupaten Bantul. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Bariq Ghufron selaku Ketua DPC PPP Bantul terkait keluasan serta batasan dukungan yang diberikan PPP terhadap pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir sebagai berikut :

“... keterbatasan karena kita tidak melakukan kampanye internal sampai pada basis-basis kecamatan ataupun kelurahan. Kita hanya mengikuti kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangannya bu Sri Suryawidati. Kita hanya saat itu saja memberikan atau memaksimalkan temen-temen PPP yang diwilayah, saat ada kampanye ditempat itu. Kalau kita riil ada hitungan dukungan kita tidak bisa mengukur itu. Dukungan politik kita sangat nampak, kemudian untuk dukungan massanya kita ada” (13 Maret 2017, Jam 10.41 WIB).

Data yang penulis dapatkan dilapangan seperti disampaikan Bariq Ghufron, keluasan dukungan yang diberikan DPC PPP

Bantul kepada pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir seluas kegiatan kampanye yang sudah diatur dan ditetapkan lokasinya oleh Tim Pemenangan pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir. Sedangkan keterbatasan dukungan dari PPP Bantul yaitu tidak sampai kepada kantong-kantong basis massa PPP yang selama ini menjadi lumbung suara PPP di Bantul.

#### **V. 2. 4. Para Pendukung Kebijakan**

Dukungan politik PPP Bantul kepada pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir dilakukan dengan mekanisme sesuai AD/ART PPP. Mekanisme rapat pleno hingga rapat pimpinan ditempuh DPC PPP Bantul, bahkan hingga ke tingkat DPW PPP DIY. Dukungan dari internal partai di tingkat Kabupaten hingga ke tingkat DPW PPP DIY sepakat untuk mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir diPemilukada Bantul 2015.

Temuan penulis di lapangan tentang para pendukung kebijakan politik DPC PPP Bantul mendukung Sri Suryawidati adalah seluruh pengurus harian DPC PPP Bantul, tujuh belas 17

Pimpinan Anak Cabang, Organisasi sayap partai GMPI, WPP, GPK dan juga Tim Badan Pemenangan Pemilu DPW PPP DIY. Temuan di lapangan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bambang Aris selaku Tim Pemenangan Pemilu DPW PPP DIY sebagai berikut :

“...dukungan itu diputuskan bersama antara DPC dengan DPW PPP DIY. Ketika itu DPC PPP Bantul bulat dan memenuhi quorum rapat” (8 Maret 2017, Jam 10.15 WIB).

Para pendukung kebijakan PPP Bantul yang mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir seperti telah disampaikan Bambang Aris selaku Tim Pemenangan Pemilu DPW PPP DIY diatas diperkuat juga dengan data wawancara penulis kepada Bariq Ghufon selaku Ketua DPC PPP Bantul sebagai berikut :

“...kalau DPC semua pengurus harian DPC PPP Bantul, ketua semua wakil ketua, sekretaris semua wakil sekretaris, bendahara semua wakil bendahara DPC PPP Bantul. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Anak Cabang. Kemudian kalau DPW ini kita sudah ada tim, jadi kita komunikasinya dengan tim DPW PPP DIY untuk Bantul, yaitu pak Edi Susilo, ada Mahmud kemudian ada pak

Muslih Ilyas, lalu ada pak Bambang Aris” (13 Maret 2017, Jam 10.46 WIB).

Berdasarkan data yang disampaikan diatas baik oleh Bambang Aris maupun Bariq Ghufron, maka keputusan DPC PPP Bantul mendukung pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir didukung oleh semua pengurus harian partai di DPC PPP Bantul. Kebijakan DPC PPP Bantul tersebut juga didukung oleh Pimpinan Anak Cabang PPP, organisasi sayap partai dan DPW PPP DIY

### **V. 3. PENOLAKAN TERHADAP KEBIJAKAN PPP BANTUL MENDUKUNGAN PASANGAN SRI SURYAWIDATI-MISBHAKUL MUNIR DALAM PEMILUKADA BANTUL 2015**

#### **V. 3. 1. Formasi Penolakan**

Dalam penelitian dilapangan yang dilakukan penulis, didapat data yang menyatakan formasi penolakan terhadap kebijakan PPP Bantul mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir. Formasi penolakan yang terjadi yaitu bergabungnya organisasi

laskar-laskar PPP Bantul kepada pasangan Suharsono-Abdul Halim Muslih dan memberi dukungan politik dalam Pemilu Bantul 2015.

Data terkait formasi penolakan didapat dari hasil wawancara dengan Bambang Aris selaku Tim Badan Pemenangan Pemilu DPW PPP DIY sebagai berikut :

“...Ternyata teman-teman laskar itu saat DPC PPP Bantul dalam proses untuk mengajukan pasangan secara politik, banyak laskar yang sudah merapat kepada Suharsono. Barangkali kedekatan laskar-laskar dengan Suharsono sudah jauh, sudah semakin mengental dan hubungan emosionalnya semakin bagus”. (8 Maret 2017).

Laskar-laskar yang menolak untuk melaksanakan kebijakan DPC PPP Bantul mendukung Sri Suryawidati-Misbhakul Munir kemudian membentuk sebuah organisasi laskar yang bernama Suara Jihad Bantul dan bergabung ke koalisi Suharsono-Abdul Halim Muslih. Organisasi laskar Suara Jihad Bantul ini yang kemudian secara aktif ikut membantu proses kemenangan Suharsono-Abdul Halim Muslih.



### **V. 3. 2. Para Penolak Kebijakan**

Keputusan DPC PPP Bantul mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir di Pemilukada Bantul 2015 mendapat penolakan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang penulis lakukan, maka didapat data wawancara dengan Eko Sutrisno Aji selaku Sekretaris DPC PPP Bantul dan juga Ketua Fraksi PPP di DPRD Bantul sebagai berikut :

“...ada yang menolak tetapi itu setelah (rapat pleno), jadi kita sudah memutuskan, bahkan ada yang hadir disana. Tetapi saat di tengah jalan itu menolak, tapi saat kita memutuskan itu hadir semua dan tidak ada yang menolak, tetapi malah justru ditengah perjalanan. Yang menolak Maming Triyono, Wakil Ketua. Yang muncul hanya itu.”. (14 Maret 2017, Jam 14.57 WIB).

Pernyataan Eko Sutrisno Aji terkait para penolak kebijakan juga dikuatkan hasil wawancara penulis dengan H.M. Syukri Fadholi selaku Ketua DPW PPP DIY. Beliau menyatakan sebagai berikut :

“...Memang yang di grass root ada, dulu laskar Suara Jihad Bantul motornya waktu itu. Ada dari pengurus DPC PPP Bantul mas Maming” (14 Maret 2017, Jam 13.37 WIB).

Wawancara dengan Bambang Aris selaku Tim Pemenangan Pemilu DPW PPP DIY terkait para penolak kebijakan DPC PPP

Bantul mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir sebagai berikut :

“...Kalo secara struktural organisasi DPC PPP Bantul itu Maming. GPK, AMK, GMPI, WPP, semua mengikuti kebijakan partai” (8 Maret 2017, jam 10.21 WIB).

Beberapa data yang berhasil penulis dapatkan di lapangan, maka bisa diidentifikasi para penolak kebijakan adalah laskar-laskar PPP Bantul yang kemudian bergabung dan membentuk organisasi laskar Suara Jihad Bantul. Sedangkan dari struktural organisasi DPC PPP Bantul yang menolak kebijakan partai mendukung pasangan calon Sri Suryawidati-Misbhakul Munir adalah Maming Triyono, Wakil Ketua DPC PPP Bantul.

### **V. 3. 3. Penolakan Terhadap Kebijakan Politik PPP Bantul Dalam Pemilukada Bantul 2015**

Munculnya penolakan terkait keputusan PPP Bantul mendukung Sri Suryawidati di Pemilukada didasari oleh beberapa permasalahan. Beberapa hal yang ditolak terhadap Kebijakan PPP Bantul didapat penulis dari wawancara dengan

Bobi selaku Koordinator Organisasi Suara Jihad Bantul yang merupakan gabungan dari beberapa laskar *underbow* dari PPP Bantul namun pada saat Pemilukada Bantul 2015 mendukung pasangan Suharsono-Abdul Halim Muslih. Bobi menyatakan sebagai berikut :

“... Alasan utama laskar menolak mendukung keputusan DPC PPP Bantul karena hampir semua laskar yang ada tidak sependang dengan DPC PPP Bantul dan menjadi suara hati grass root sehingga DPC PPP Bantul tidak berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pendukung di akar rumput, sehingga mereka kemudian menentukan sendiri pilihannya” (18 Maret 2017, Jam 21.55 WIB).

Data terkait hal ditolak terkait kebijakan DPC PPP Bantul juga di dapatkan penulis dari wawancara dengan Hendri selaku anggota laskar PPP Bantul yang kemudian bergabung dengan Tim Pemenangan Pemilu pasangan Suharsono-Abdul Halim Muslih. Hendri menyampaikan sebagai berikut :

“...Alasan utama laskar PPP Bantul menolak mengikuti kebijakan politik DPC PPP Bantul mendukung Sri Suryawidati-Misbhakul Munir karena DPC PPP Bantul melalui Ketua DPC membuat keputusan sepihak untuk mendukung pasangan calon nomer dua (Sri Suryawidati-Misbhakul Munir) yang di usung PDI Perjuangan”. (19 Maret 2017, Jam 11.27).

Sebagai pelengkap data penelitian terkait dengan penolakan terhadap kebijakan politik PPP Bantul di Pemilu pada 2015 penulis dapatkan dalam wawancara dengan Eko Sutrisno Aji selaku Sekretaris sekaligus Ketua Fraksi PPP di DPRD Bantul. Beliau menyampaikan sebagai berikut :

“... Pertama, mereka mempermasalahkan bahwa PDI Perjuangan dan PPP di DIY ini seperti air dan minyak, susah bersatu. Yang kedua, terkait dengan pemimpin perempuan. Secara substansial itu setahu saya” (15 Maret 2017, Jam 12.49 WIB).

Berdasarkan kajian dari beberapa data yang telah disampaikan diatas terkait penolakan terhadap kebijakan PPP Bantul mendukung pasangan Sri Suryawidati-Misbhakul Munir di Pemilu pada 2015 adalah sebagai berikut :

1. DPC PPP Bantul tidak berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pendukung di akar rumput, sehingga mereka kemudian menentukan sendiri pilihannya.
2. Secara historis PDI Perjuangan dengan PPP di DIY seperti air dan minyak, sangat susah bersatu.
3. Terkait dengan larangan perempuan sebagai pemimpin dalam konsep kepemimpinan pada ajaran Islam.